

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Landasan Teori

2.1.1 Akuntansi Sektor Publik

Istilah “Sektor publik” memiliki definisi yang beragam dikarenakan dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu (ekonomi, politik, hukum dan sosial) memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda. Dari sudut pandang ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik (Inapty, 2017:1).

Menurut Kuchlis dkk, (2021:3) Akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai suatu proses pengumpulan, pengklasifikasian, analisis serta dalam pembuatan laporan pengelolaan keuangan ini nantinya dapat digunakan lembaga publik untuk memberikan informasi laporan pengelolaan pada pihak yang membutuhkan yang sangat membantu saat ada pengambilan keputusan.

2.1.1.1 Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik

Menurut Bastian (2010:6) ruang lingkup akuntansi sektor publik meliputi lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen bawahnya, pemerintah daerah, yayasan, partai politik, perguruan tinggi dan organisasi-organisasi nirlaba lainnya. Jadi, proses pelaporan pertanggung jawaban masyarakat harus segera di atur dalam rangka standar akuntansi sektor publik. Di Indonesia, akuntansi sektor publik mencakup beberapa bidang yaitu:

- a. Akuntansi pemerintahan Pusat
- b. Akuntansi pemerintahan Daerah
- c. Akuntansi partai politik
- d. Akuntansi LSM (Layanan Suadaya Masyarakat)
- e. Akuntansi yayasan
- f. Akuntansi pendidikan (sekolah dan perguruan tinggi)
- g. Akuntansi kesehatan (rumah sakit dan puskesmas)
- h. Akuntansi tempat beribadah (Masjid, gereja, pura dan wihara)

2.1.1.2 Elemen – Elemen Akuntansi Sektor Publik

Menurut Bastia (2010:7) elemen sektor publik adalah bagian-bagian yang dibutuhkan dalam pengelolaan manajemen keuangan sektor publik. Berikut elemen-elemen akuntansi sektor publik yaitu:

- a. Perencanaan Publik merupakan proses untuk menentukan tindakan yang tepat di masa depan melalui urutan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
- b. Penganggaran Publik merupakan alat akuntabilitas, manajemen dan kebijakan ekonomi sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan negara.
- c. Realisasi Anggaran Publik merupakan pelaksanaan anggaran publik yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam program serta kegiatan yang nyata.

- d. Pengadaan Barang dan Jasa merupakan pertolongan yang sangat berguna, pertumbuhan memberikan pelayanan atau servis kepada pelanggan, serta aktivitas, kemudahan, manfaat dan sebagainya yang dijual kepada pelanggan.
- e. Pelaporan Keuangan Sektor Publik adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh pihak yang berkepentingan.
- f. Audit Sektor Publik merupakan suatu investasi independen terhadap beberapa aktivitas khusus.
- g. Pertanggung Jawaban Publik adalah proses atau tindakan yang dilakukan oleh kepala organisasi sektor publik dalam menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada pemberi amanatnya. Contoh, menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bupati kepada DPRD dan penyampaian LPJ ketua yayasan kepada dewan penyantunnya.

2.1.1.3 Sifat dan Karakteristik Akuntansi sektor publik

Organisasi sektor publik bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks dan *turbulence*. Menurut Mahsun, (di kutip di Madjid, 2019:12) menyebutkan sektor publik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan umum dan menyediakan barang atau jasa kepada publik yang di bayar melalui pajak atau pendapatan negara lain yang diatur dengan hukum. Seperti bidang kesehatan, pendidikan, keamanan dan transformasi. Mardiasmo (2018:3) komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik, diantaranya:

1. Faktor Ekonomi

- a. Pertumbuhan ekonomi
- b. Tingkat inflasi
- c. Pertumbuhan pendapatan per kapita (GNP/GDP)
- d. Struktur produksi
- e. Tenaga kerja
- f. Arus modal dalam Negri
- g. Cadangan devisa
- h. Nilai tukar mata uang
- i. Utang dan bantuan luar negeri
- j. Infrastruktur
- k. Teknologi
- l. Kemiskinan dan kesejahteraan ekonomi
- m. Sektor informasi

2. Faktor politik

- a. Hubungan Negara dengan masyarakat
- b. Legitimasi pemerintah
- c. Tipe rezim yang berkuasa
- d. Ideologi Negara
- e. Elit politik dan massa
- f. Jaringan Internasional
- g. Kelembagaan

3. Faktor kultural

- a. Keragaman suku, ras, agama, bahasa dan budaya

- b. Sistem nilai di masyarakat
- c. Historis
- d. Sosiologi masyarakat
- e. Karakteristik masyarakat
- f. Tingkat Pendidikan

4. Faktor demografi

- a. Pertumbuhan penduduk
- b. Struktur usia penduduk
- c. Migrasi
- d. Tingkat kesehatan

2.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan landasan bagi pengelolaan keuangan pemerintahan daerah dan merupakan pedoman bagi pemerintahan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam satu tahun (Putra, 2022:2).

Bentuk dan susunan APBD mengalami dua kali perubahan, susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang mula-mula terdiri anggaran rutin dan anggaran pembangunan kemudian mengalami perubahan dengan dikeluarkannya beberapa peraturan pada tahun 1984-1988 berubah menjadi pendapatan dan belanja. Menurut Putra (2022:291) pendapatan daerah merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu yang berasal dari penerimaan dana perimbangan pusat dan daerah, juga pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri seperti (PAD seta

pendapatan lain-lain yang sah. Menurut Putra, (2022:291) PAD merupakan penerimaan murni daerah dan perannya merupakan indikator sejauh mana telah dilaksanakannya otonomi tersebut secara luas, nyata dan bertanggung jawab..

Sumber pendapatan asli daerah sebagai berikut:

- Pajak daerah
- Retribusi daerah
- Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisah
- Lain-lain PAD yang sah

Perubahan kedua di era pra-reformasi terjadi pada tahun 1998 yaitu pada pendapatan dari daerah. Perubahan terjadi pada klasifikasinya, jika pada bentuk sebelumnya pendapatan daerah terbagi menjadi 4 yaitu sisa lebih perhitungan tahun lalu, pendapatan asli daerah, bagi hasil paja dan sumbangan bantuan, maka pada bentuk yang baru ini bagi hasil pajak/bukan pajak serta sumbangan dan bantuan menjadi satu bagian yang bernama pendapatan yang berasal dari pemberian yang lebih tinggi (kusufi dan Halim, 2014:23).

Peraturan-peraturan di era reformasi keuangan daerah mengisyaratkan agar laporan keuangan makin informatif. Dalam bentuk yang baru, APBD terbagi menjadi 3 bagian yaitu pendapatan (pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah), belanja dan pembiayaan. Setelah berlakunya Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 belanja hanya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu belanja langsung dan tidak langsung. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung yaitu belanja yang

dianggarkan dan berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah seperti belanja pegawai, barang dan jasa serta belanja modal (Erlina dan Rasdianto, 2015:154).

2.1.3 Belanja Modal

Belanja modal merupakan belanja yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara nyata. Infrastruktur yang dibiayai dengan belanja modal nantinya akan mempercepat roda perekonomian sehingga dapat berjalan dengan lancar dikarenakan distribusi barang dan jasa dapat dilakukan dengan efisien dan efektif (Halim 2017:214). Belanja yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah serta akan menimbulkan konsekuensi menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan (Tamawiyw, 2016).

Manurut Erlina dan Rasdianto (2015:155) Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Seperti Perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan serta aset tak berwujud.

2.1.3.1 Kriteria Belanja Modal

Dalam peraturan direktor Jendral Perbendaharaan terkait pedoman penggunaan akun pendapatan barang, belanja modal dan belanja pegawai No. PER-33/PB/2008 bahwa karakteristik:

- a. Pengeluaran mampu mengakibatkan adanya pendapatan aset tetap ataupun aset lainnya yang mampu menambah masa umur, kapasitas dan juga manfaat dari aset itu sendiri.
- b. Kegiatan pengeluaran yang dilakukan mampu melebihi kapasitas aset tetap ataupun aset lainnya yang sudah ditetapkan di dalam peraturan pemerintah
- c. Pengadaan aset tetap dilakukan bukan untuk dijual kembali.
- d. Pengeluaran yang dilakukan setelah memperoleh aset tetap atau aset lainnya dengan masa kapasitas, kualitas, manfaat dan volume asetnya yang harus di tambah.
- e. Pengeluaran harus mampu memenuhi batasan minimal pada nilai kapitalisasi aset tetap atau lainnya.

2.1.3.2 Jenis Belanja Modal

Menurut Halim (2017:213) belanja modal dibagi menjadi beberapa jenis peraturan Pemerintahan No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan antara lain:

- a. Belanja modal tanah
Yaitu seluruh pengeluaran untuk perolehan hak atas tanah.
- b. Belanja modal peralatan dan mesin
Yaitu seluruh pengeluaran untuk pembelian alat-alat dan mesin yang nantinya digunakan untuk kegiatan.
- c. Belanja modal gedung dan bangun
Yaitu seluruh biaya untuk pembangunan gedung dan bangunan.
- d. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan

Yaitu seluruh pengeluaran untuk pembangunan sarana dan prasarana jaringan pengairan, jaringan instalasi distribusi listrik dan jaringan telekomunikasi serta jaringan lain yang berfungsi sebagai prasarana dan sarana fisik distribusi.

e. Belanja modal fisik lainnya

Yaitu seluruh biaya dalam rangka pengadaan/pembangunan belanja fisik lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam belanja modal tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan, jaringan (jalan dan irigasi) dan belanja modal non fisik.

Belanja modal non fisik seperti antara lain kontrak sewa beli, pengadaan/pembangunan barang-barang kesenian, pembelian hewan ternak dan pengadaan buku-buku.

1.1.4 Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah

Menurut Wahyuni dan Rosmida (2016) Kinerja dapat diartikan sebagai suatu prestasi yang dicapai oleh pegawai pemerintah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam satu periode, Permandagri Nomor 13 Tahun 2006 (dikutip di Putra, 2022:45) menyebutkan bahwa kinerja adalah kelurahan/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah di capai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kualitas-kualitas yang terukur.

Kinerja keuangan merupakan hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan dalam menjalankan fungsinya mengelola aset. Menurut Putra (2022:46) kinerja keuangan adalah suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian suatu kegiatan, program, kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan,

visi, dan misi organisasi yang tertulis dalam rencana strategi suatu organisasi. Tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Kinerja keuangan merupakan salah satu faktor yang menunjukkan efektifitas dan efisiensi suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan (Sulistiyowati dan Fidiana, 2017).

Menurut Mamesah (dikutip di Putra 2022:46) keuangan daerah dapat diartikan sebagai hak dan kewajiban yang dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu naik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum di kuasai atau dimiliki negara atau daerah yang lebih tinggi atau pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Halim (dikutip di Putra 2022:45) menyatakan keuangan daerah memiliki ruang lingkup yang terdiri atas keuangan yang di kelola langsung dan kekayaan daerah yang di pisahkan. Yang termasuk keuangan daerah yang di kelola langsung adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang investasi milik daerah sedangkan keuangan daerah yang di pisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kinerja keuangan daerah adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga di peroleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan. Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik, apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan kinerja sangat bagus, sebaliknya jika pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan maka kinerjanya kurang bagus (Putra, 2022:53) .

2.1.4.1 Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi (Mardiasmo, 2018:151). Sistem pengukuran kinerja sektor publik merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendali organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan kompensasi dan sanksi (*reward and punishmen system*) (Putra, 2022:51).

Pengukuran kinerja untuk menilai prestasi dan akuntabilitas organisasi dan manajemen dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas yang merupakan salah satu ciri dari terapan *good governance* bukan hanya sekedar

kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efektifitas dan efisien (Putra, 2022:50). Ekonomis terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir *input resources* yang digunakan, yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Efisiensi merupakan perbandingan *output/input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau program dengan target yang telah ditetapkan yang merupakan perbandingan-perbandingan *outcome* dengan *output* (Mardiasmo, 2002).

2.1.4.2 Manfaat dan Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Bastian (2009) Pengukuran kinerja keuangan pemerintahan daerah dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan yaitu:

- a. Memperbaiki kinerja pemerintah daerah agar pemerintah dapat berfokus pada tujuan dan sasaran program sehingga diharapkan akan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam memberikan pelayanan publik.
- b. Membantu pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan yang objektif.
- c. Mewujudkan pertanggung jawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelambagaan.

Menurut Putra (2022:54) Tujuan dari pengukuran kinerja yaitu:

- a. Untuk mengkomunikasikan strategi lebih baik.
- b. Untuk mengukur kinerja finansial dan nonfinansial secara berimbang, sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi.

- c. Untuk mengkomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah memotivasi untuk mencapai kesesuaian tujuan.
- d. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

Menurut Putra (2022:52) Manfaat dari penilaian kinerja yaitu sebagai berikut :

- a. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi.
- b. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai.
- c. Memperbaiki kinerja periode-periode berikutnya.
- d. Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishmen*).
- e. Memotivasi pegawai.
- f. Menciptakan akuntabilitas publik.

2.1.4.3 Indikator Kinerja Pemerintahan Daerah

Menurut Bastian (dikutip di lis dan ida, 2018) indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan yaitu dengan menghitung indikator masuk (*input*), keluar (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impact*) :

- a. Indikator masuk (*inputs*) adalah segala sesuatu yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan agar menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat

berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijakan/peraturan perundang-undangan dan sebagainya.

- b. Indikator keluaran (*output*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat di peroleh dari suatu kegiatan, baik kegiatan yang berupa kegiatan fisik maupun non fisik.
- c. Indikator hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluar kegiatan pada jangka menengah.
- d. Indikator manfaat (*benefit*) adalah segala sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
- e. Indikator dampak (*impacts*) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif terhadap setiap indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Menurut Mardiasmo (2018:5) faktor yang mempengaruhi kinerja daerah yaitu *Output* dan *Inputs*, maka semakin besar *outputs* di banding *inputs*, maka semakin tinggi efisiensi suatu organisasi, maka proksi pengukuran kinerja pemerintahan daerah untuk digunakan dengan rumus efisiensi dan diukur dengan rasio *inputs* dan *outputs*. Faktor yang mempengaruhi kinerja daerah yaitu *inputs* dan *outputs*. Yang mana *input* adalah sumber daya yang digunakan untuk kebijakan, program dan aktivitas dapat berupa pendapatan/penerimaan suatu daerah, sedangkan *output* adalah hasil yang di capai dari suatu program aktivitas dan kebijakan seperti belanja modal dan penilaian kinerja.

2.1.4.4 Jenis – Jenis Analisis Rasio Keuangan

Menurut Putra (2022:60) ada beberapa cara dalam pengukuran kinerja keuangan daerah salah satunya yaitu dengan menggunakan rasio kinerja keuangan daerah. Beberapa rasio yang bisa digunakan yaitu Rasio pertumbuhan, rasio kemandirian keuangan daerah, Derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio aktivitas, efektivitas dan efisiensi keuangan daerah. Namun di penelitian ini hanya menggunakan rasio derajat desentralisasi, efektivitas PAD dan efisiensi keuangan daerah.

a. Derajat Desentralisasi

Menurut Daling (dikutip di Putri dan Rahayu, 2019) derajat desentralisasi menunjukkan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menggali dan mengelola pendapatan, semakin tinggi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintahan daerah dalam peneyelenggaraan desentralisasi. Pengukuran ini dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah PAD dengan total penerimaan daerah (Putra, 2022:62).

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Penerimaan Daerah}}$$

Tabel 2.1
Kriteria penilaian tingkat desentralisasi fiskal

| Perentase PAD terhadap TPD | Tingkat desentralisasi fiskal |
|----------------------------|-------------------------------|
| 0,00-10,00 | Sangat kurang |
| 10,01-20,00 | Kurang |
| 20,01-30,00 | Sedang |
| 30,01-40,00 | Cukup |
| 40,01-50,00 | Baik |
| > 50,00 | Sangat baik |

Sumber : Tim Litbang Depdagri (Bisma dan Heri, 2010)

b. Rasio Efektivitas

Rasio ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan, dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi asli daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas maka kemampuan pemerintah daerah semakin baik (Putra, 2022:65)

$$\text{Tingkat Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}}$$

Tabel 2.2
Kriteri Efektivitas Kinerja Keuangan

| Persentase kinerja keuangan | Kriteria |
|-----------------------------|--------------------|
| ≥100% | Sangat Efektivitas |
| 90 – 100% | efektivitas |
| 80-90% | cukup efektivitas |
| 60-80% | Kurang efektivitas |
| ≤60% | Tidak efektivitas |

Sumber : Tim Litbang Depdagri (Bisma dan Heri, 2010)

c. Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima (Putra, 2022:64).

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi belanja}}{\text{Realisasi pendapatan}}$$

Tabel 2.3

Kriteria efisiensi kinerja keuangan

| Persentase kinerja keuangan | Kriteria |
|------------------------------------|-----------------|
| 100% ke ats | Tidak efisien |
| 90%-100% | Kurang efisien |
| 80%-90% | Cukup efisien |
| 60%-80% | Efisien |
| Dibawah 60% | Sangat efisien |

Sumber : Tim Litbang Depdagri(Bisma dan Heri, 2010)

2.1.5. Hubungan antara Derajat Desentralisasi dengan Belanja Modal

Menurut Putri dan Rahayu (2019) derajat desentralisasi menunjukkan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menggali dan mengelolah pendapatan. Semakin tinggi Kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah PAD dengan total penerimaan daerah (Putra 2022:62). Semakin tinggi atau meningkatnya derajat desentralisasi setiap tahun diharapkan mampu memberikan efek signifikan terhadap alokasi belanja modal.

2.1.6 Hubungan antara Efektivitas PAD dengan Belanja Modal

Menurut Erlina dan Rasdianto (2015:155) belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal berkaitan dengan kemampuan merealisasikan pendapatan daerah. Hal ini berhubungan dengan rasio efektivitas yang menggambarkan kemampuan pemerintahan daerah dalam

merealisasikan penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan berdasarkan potensi nyata daerah. Efektivitas PAD dihitung dengan cara membagikan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (Putra 2022:63) semakin tinggi peningkatan Efektivitas PAD maka semakin baik kinerja pemerintahan dalam merealisasikan PAD di daerah tersebut. Sehingga dapat meningkatkan alokasi belanja dan memberikan efek signifikan terhadap belanja modal.

2.1.7 Hubungan antara Efisiensi dengan Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran pemerintahan daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah serta akan menimbulkan konsekuensi menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan (Mardiasmo, 2018:113). Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah. Sehingga semakin kecil nilai rasio ini maka semakin efisien suatu daerah (Putra, 2022). Efisiensi keuangan daerah dihitung dengan membagi realisasi belanja dengan realisasi pendapatan. Semakin baik tingkat efisiensi keuangan daerah diharapkan mampu meningkatkan belanja modal yang akan digunakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang ada.

2.1.1.8 Hubungan antara Derajat Desentralisasi, Efektivitas PAD dan Efisiensi Secara Simultan terhadap Belanja modal

Derajat desentralisasi merupakan mengukur besarnya campur tangan pemerintah pusat serta kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan desentralisasi. Semakin terdesentralisasi suatu daerah menunjukkan semakin mandiri daerah tersebut dalam mengelola perekonomian daerahnya sehingga membuat

pemerintah lebih leluas untuk menentukan dan meningkatkan pembangunan daerah yang tercermin dalam belanja modal. Selanjutnya efektivitas PAD yang mencerminkan kemampuan daerah dalam menyerap PAD semakin tinggi kinerja dan penyerapan PAD daerah tersebut, hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar pula pengeluaran belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah. Selanjutnya efisien PAD yang mencerminkan efisiensi pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas besarnya PAD yang didapat. Semakin tinggi rasio efisiensi keuangan menunjukkan bahwa pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah termasuk dalam pengeluaran yang boros, sehingga menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah yang digunakan pemerintah sebagai pengeluaran belanja modal yang cenderung lebih kecil.

Dari penjelasan diatas antara derajat desentralisasi, Efektivitas PAD dan efisiensi keuangan tentu memiliki hubungan untuk melihat bagaimana kinerja keuangan di suatu daerah apakah sudah terlaksana secara baik atau belum. Sehingga dapat dikatakan bahwa baik buruknya kinerja pemerintah dapat mempengaruhi besar kecilnya pembiayaan yang dilakukan pemerintah untuk belanja modal.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.4
Penelitian Sebelumnya

| No | Nama Peneliti | Judul Peneliti, jurnal, volume, nomor, tahun | Variabel yang diteliti, Alat Analisis dan Hasil Peneliti | Persamaan | Perbedaan |
|----|----------------------------------|--|--|--|--|
| 1. | Rinta Sefti Putri dan Sri Rahayu | Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal, JASa (jurnal akuntansi, audit dan sistem informasi akuntansi), Vol. 3 No. 2/ Agustus 2019 | <ul style="list-style-type: none"> • Derajat Desentralisasi (X₁) • Kemandirian Keuangan Daerah (X₂) • Efektivitas PAD (X₃) • Efisiensi Keuangan Daerah (X₄) • Kontribusi BUMD (X₅) • Belanja modal (Y) <p>Alat analisis, menggunakan regresi Data Panel</p> <p>Hasil peneliti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Secara simultan (bersama-sama) Derajat desentralisasi daerah, kemandirian keuangan daerah, efektivitas PAD, Efisiensi keuangan daerah dan kontribusi | <ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan metode Kuantitatif • Menggunakan 3variabel rasio yaitu derajat desentralisasi, efektivitas PAD dan efisiensi PAD. | <p>Yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi penelitian di Provinsi Jawa Barat • Menggunakan metode analisis regresi data panel • Berjumlah 100 sampel selama periode 4 (empat) tahun 2014-2017 |

| | | | | | |
|----|-----------------------------------|--|---|---|--|
| | | | <p>BUMD berpengaruh terhadap belanja modal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Secara parsial Derajat desentralisasi, kemandirian keuangan daerah, efektivitas PAD dan efisiensi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Sedangkan derajat kontribusi BUMD tidak berpengaruh terhadap belanja modal | | |
| 2. | Nurhasana, Annisa dan Nelly, 2022 | <p>Pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap belanja modal pada kabupaten Di provinsi Sumatera Selatan</p> <p>Syntax Idea: p-ISSN: 2684-6853 e-ISSN: 2684-883X</p> <p>Vol. 4, No. 6, Juni 2022</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan keuangan daerah • Derajat desentralisasi • Efisiensi keuangan daerah • Efektifitas PAD • Ketergantungan Keuangan daerah • Belanja modal (Y) <p>Alat analisis menggunakan regresi linear berganda.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Meneliti kinerja keuangan daerah Meliputi (Derajat Desentralisasi, Efektivitas PAD, Efisiensi Keuangan Daerah) Terhadap Belanja Modal di provinsi Sumatera Selatan | <ul style="list-style-type: none"> • Tahun penelitian 2016-2020 • Menggunakan 5 variabel |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>Hasil Analisis :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal 2. Derajat desentralisasi berpengaruh negatif signifikan terhadap belanja modal 3. Efisiensi berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal 4. Efektivitas PAD dan ketergantungan keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal 5. Secara simultan pertumbuhan keuangan daerah, derajat desentralisasi, efisiensi keuangan daerah, efektivitas PAD, ketergantungan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal | <ul style="list-style-type: none"> • menggunakan metode Kuantitatif • belanja modal sebagai variabel (Y) | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|----|-----------------------------|--|---|--|--|
| 3. | Indiyanti dan Rahyuda, 2018 | <p>Pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap Alokasi belanja modal di provinsi Bali</p> <p>E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 7 No. 9, 2018:4713-4746</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Derajat desentralisasi fiskal • Rasio kemandirian keuangan daerah • Rasio efektifitas PAD • Rasio Efisiensi keuangan daerah • Rasio tingkat pembiayaan SILPA • Rasio derajat kontribusi BUMD <p>Alat analisis yang digunakan analisis linear berganda</p> <p>Hasil penelitian :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Derajat desentralisasi fiskal memiliki pengaruh positif terhadap besar kecilnya pengalokasian belanja modal • Rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal • Pengaruh rasio efektifitas PAD tidak berpengaruh | <ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan metode kuantitatif • Belanja modal sebagai variabel (Y) | <ul style="list-style-type: none"> • Menganalisis kemandirian keuangan daerah • Rasio tingkat pembiayaan sisa lebih anggaran (silpa) • Menganalisis derajat kontribusi BUMD |
|----|-----------------------------|--|---|--|--|

| | | | | | |
|---|------------------------|---|--|---|--|
| | | | <p>signifikan terhadap alokasi belanja modal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengaruh rasio efisiensi keuangan daerah berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap besar kecilnya alokasi belanja modal • Rasio tingkat pembiayaan SILPA berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal | | |
| 4 | Yanto dan Astuti, 2020 | <p>Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Riau</p> <p>Junal <i>SOROT</i>, Vol 10, No 2, Oktober 2015</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Kinerja keuangan (X_1) • Rasio Kemandirian Keuangan ($X_{1.1}$) • Rasio efektifitas PAD ($X_{1.2}$) • Rasio efisiensi ($X_{1.3}$) • Rasio Derajat Desentralisasi ($X_{1.4}$) • Rasio Ketergantungan Keuangan ($X_{1.5}$) • Alokasi Belanja Modal (X_2) • Pertumbuhan Ekonomi (Y) <p>Alat analisis menggunakan deskriptif dan analisis jalur</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan Metode Kuantitatif • Menggunakan 3 rasio | <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi penelitian di Kabupate/Kota Riau • Menggunakan analisis jalur • Jumlah 60 Populasi selama tahun 2009-2013 |

| | | | | | |
|---|-----------------------------|---|--|--|--|
| | | | <p>Hasil Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kinerja keuangan berpengaruh terhadap belanja modal • Alokasi belanja modal tidak memiliki pengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi • Kinerja keuangan secara langsung memiliki signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi • Kinerja keuangan secara tidak langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi | | |
| 5 | Martini dan Dwirandra, 2015 | <p>Pengaruh kinerja keuangan daerah pada alokasi belanja modal di Provinsi Bali</p> <p>Jurnal Akuntansi Universitas Udaya 10.2 (2015):426-443 ISSN: 2302-8556</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Derajat Desentralisasi fiskal • Ketergantungan Keuangan • Efektivitas PAD Sisa Lebih Anggaran (SILPA) • Efisiensi • Belanja Modal • Kontribusi BUMD <p>Teknik analisis analisis linier berganda</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan 3 rasio yaitu derajat desentralisasi, efektivitas dan efisiensi PAD • Menggunakan data sekunder | <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi penelitian di Provinsi Bali • Populasi terdiri dari 8 kabupaten dan 1 kotaselama periode 2007 – 2012 |

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| | | | <p>Hasil Penelitian :</p> <ul style="list-style-type: none">• Kinerja keuangan yang terdiri dari rasio ketergantungan berpengaruh negatif dan signifikan pada alokasi belanja modal• Rasio tingkat pembiayaan SILPA berpengaruh negatif dan signifikan pada alokasi belanja modal• Rasio efektivitas PAD berpengaruh positif namun tidak signifikan pada alokasi belanja modal• Rasio SILPA berpengaruh negatif dan signifikan pada belanja modal,• Rasio efisiensi berpengaruh negatif dan signifikan pada belanja modal• Kontribusi BUMD berpengaruh positif namun tidak signifikan pada alokasi belanja modal | | |
|--|--|--|---|--|--|

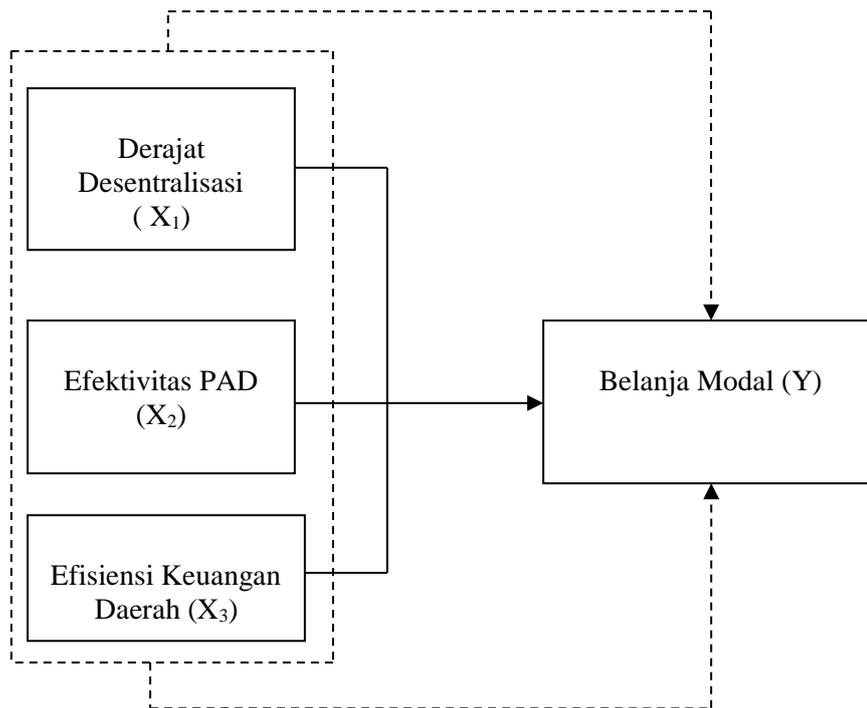
| | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|
| 6 | Tamawiwiy, J Sondakh, dan D.L Warongan, 2016 | <p>Pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap belanja modal untuk pelayanan publik</p> <p>Vol 7, No 2, Desember 2016</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan PAD • Desentralisasi Fiskal • Efektivitas keuangan daerah • Efisiensi keuangan daerah • Belanja modal untuk pelayanan publik (Y) <p>Alat analisis <i>pooled data</i></p> <p>Hasil Penelitian :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal • Desentralisasi fiskal, efektivitas dan efisiensi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja modal | <ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan Metode Kuantitatif • Menggunakan 3 rasio | <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi Penelitian di Provinsi Sulawesi Utara • Menggunakan metode <i>pooled data</i> • Populasi dan sampel berjumlah 10 Kabupaten selama tahun 2010-2015 |
| 7 | Praza, 2016 | <p>Analisis Pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap alokasi belanja di Provinsi Jambi</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Belanja modal • Derajat desentralisasi • Rasio ketergantungan • Rasio kemandirian • Derajat kontribusi BUMD • Rasio efektivitas | <ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan rasio derajat desentralisasi • Rasio efektivitas • Belanja modal | <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi penelitian di Provinsi Bali • menggunakan populasi 2 Kota 9 Kabupaten tahun 2010-2013 |

| | | | | | |
|---|---------------------|--|---|---|---|
| | | Jurnal Perspektif Vol 4 No. 1, Juli-September 2016 ISSN: 2338-4603 | <p>Alat analisis FEM (<i>fixed Effect Model</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Derajat desentralisasi memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal daerah • Ketergantungan, rasio kemandirian dan derajat desentralisasi BUMD memiliki hubungan yang negatif namun tidak signifikan terhadap belanja modal • Rasio efektivitas PAD tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal | | |
| 8 | Arif dan Arza, 2019 | Pengaruh Kinerja keuangan terhadap alokasi belanja modal pemerintahan daerah di kabupaten/kota provinsi Sumatera Barat tahun 2013-2017 | <ul style="list-style-type: none"> • Rasio kemandirian, • Rasio efisiensi, • Rasio efektivitas • Rasio pertumbuhan • Keserasian belanja <p>Alat analisis Eviews 8.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengaruh kemandirian keuangan daerah secara parsial tidak berpengaruh | <ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan rasio efisiensi dan rasio efektivitas | <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi penelitian di Provinsi Sumatera Barat • menggunakan populasi yang terdiri dari 7 kota dan 12 kabupaten pada tahun 2013-2017 |

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| | | Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi Vol.9 N0. 2 Edisi November 2018 | <p>positif signifikan terhadap belanja modal</p> <ul style="list-style-type: none">• Efektivitas PAD tidak berpengaruh terhadap belanja modal• Efisiensi memiliki hubungan positif terhadap alokasi belanja modal• Keserasian belanja berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal | | |
|--|--|--|---|--|--|

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan judul yang penulis ajukan maka variabel independen yaitu belanja modal dan variabel dependen adalah Derajat Desentralisasi (X_1), Efektivitas PAD (X_2) dan Efisiensi Keuangan Daerah (X_3). Dengan demikian, maka kerangka pemikiran dapat di ilustrasikan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Keterangan :

- > : Parsial
- - - - -> : Simultan

2.4 Hipotesis

Menurut Sujarweni (2015:68) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap tujuan penelitian yang di turunkan dari kerangka pemikir yang telah di buat Hipotesis merupakan pernyataan penelitian tentang hubungan antara dua varabel atau lebih. Dengan kata lain hipotesis dapat disimpulkan pernyataan tentatif mengenai pengaruh antara dua variabel atau lebih. Dari penjelasan diatas bahwa hipotesis ini adalah dugaan sementara dari jawaban rumusan dalam masalah penelitian. Hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Diduga adanya pengaruh antara derajat desentralisasi daerah terhadap belanja modal Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2021.
2. Diduga adanya pengaruh antara efektivitas PAD terhadap belanja modal Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2021.
3. Diduga adanya pengaruh antara efisiensi keuangan daerah terhadap belanja modal Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2021.
4. Diduga adanya pengaruh antara derajat desentralisasi, efektivitas PAD dan efisiensi keuangan daerah terhadap belanja modal Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2021.